

POTENSI BMT (BAITUL MAL WATTAMWIL) PESANTREN GUNA MENGERAKKAN EKONOMI SYARI'AH DI MASYARAKAT

Rulyjanto Podungge

ABSTRAK

Ekonomi Syari'ah mengalami akselerasi perkembangan bukan semata karena aspek emosional keagamaan tetapi juga aspek rasionalitas ekonomi yaitu terterima oleh masyarakat dan pasar. Pesantren dengan kekayaan kultur dan potensi ekonominya, sangat strategis sebagai penggerak ekonomi syari'ah. Pesantren layak menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syari'ah di negeri ini. Pesantren telah menciptakan kemajemukan dan kedinamisan sebagai sebuah lembaga multi fungsi yang melibatkan kiai, santri, ustadz, masyarakat, dan pemerintah. Dari identitas dan dinamisasi itulah, maka pesantren dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi bahkan politik. Fondasi motor penggerak adalah koperasi BMT. Fleksibilitas BMT sebagai lembaga bisnis jasa keuangan syari'ah dan organ inti sel bisnis sektor riil, sinergis dan simultan bersama pesantren dengan pelanggan fanatiknya.

A. Latar Belakang

Tulisan ini hadir, atas dasar realitas bahwa pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dipunyainya, layak secara bisnis menjadi lokomotif penggerak ekonomi syari'ah di Indonesia. Di samping itu, praktik dan produk-produk ekonomi syari'ah hakikatnya merupakan kekayaan pesantren. Namun walaupun perkembangan ekonomi syari'ah di tanah air telah melewati masa satu dasa warsa, pengembangan ekonomi syari'ah di pesantren belum optimal. Dalam tulisan ini pilihan jatuh kepada Koperasi BMT¹ sebagai motor penggerak ekonomi syari'ah di pesantren.

¹ BMT adalah singkatan dari nama sebutan lembaga keuangan mikro syari'ah Baitul Mal Wattamwil atau padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu. BMT secara harfiah terdiri dari 2 kata; *baitul mal* berarti rumah dana dan *baituttamwil* berarti rumah usaha. Baitul Mal merupakan replika dari baitul mal dalam sejarah Islam sejak kenabian yang berfungsi mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan baituttamwil merupakan lembaga bisnis jasa keuangan bermotif laba. Dengan demikian BMT bukan lembaga penyalur dana sosial, melainkan organisasi bisnis yang berperan sosial. Dari aspek operasionalnya, BMT merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang bergerak pada tiga bidang; *pertama*, sebagai lembaga keuangan yang mengelola uang dengan pola bagi hasil, jual beli, ijarah, serta bentuk-bentuk lainnya. *Kedua*, sebagai lembaga yang bergerak dalam unit usah sektor riil. *Ketiga*, bergerak dalam bidang sosial dengan cara mengelola dana yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah,

Fleksibilitas keorganisasian BMT, pada satu sisi merupakan lembaga bisnis jasa keuangan syari'ah sekaligus organ inti sel bisnis sektor riil dan juga berperan sosial pada sisi lainnya, sangat cocok dengan eksistensi dan khazanah kultur pesantren, termasuk “*captive market*” yang dipunyainya. Potensi ekonomi dan bisnis apapun yang ada di pesantren dapat dikembangkan melalui koperasi BMT.

Sejumlah pesantren sejak lama telah berperan sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat dengan mengembangkan aneka bisnis, baik berskala mikro, kecil, dan menengah meliputi bidang usaha produktif yang menjadikan pesantren semakin memiliki kemandirian dalam menjalankan keseluruhan kiprahnya. Pengembangan bidang ekonomi ini biasanya bergantung pada potensi ekonomi internal dan eksternal yang ada di lingkungan pesantren. Beberapa ciri khas pesantren diantaranya; pesantren menyatu dengan kehidupan masyarakat, kegiatan pesantren selalu melibatkan masyarakat sekitar, pesantren merupakan milik masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Terdapat empat alasan untuk mengungkap potensi pesantren dalam menggerakkan perkembangan ekonomi syari'ah di masyarakat, yaitu:

1. Pesantren sejak lama telah lama berperan dalam bidang perekonomian.
2. Setiap pesantren pada dasarnya mempunyai pelanggan tetap (*captive market*) yang khas.
3. Pesantren di mana pun keberadaannya mempunyai “*magnet in heren*” bagi kebanyakan umat Islam di Indonesia.
4. Praktik-paraktik perekonomian syari'ah pada hakikatnya merupakan khazanah kekayaan pesantren.²

Tanggapan dan resistensi masyarakat Indonesia terhadap perkembangan ekonomi Islam kiranya sangat jauh berbeda dengan wacana politik Islam. Perbedaan tanggapan dan resistensi ini terletak bahwa politik Islam membawa konsekuensi yang sangat jauh dalam kaitannya dengan sistem politik dan kenegaraan Republik ini. Sebaliknya, ekonomi Islam hanya dilihat dari aspek bahwa ekonomi Islam menjanjikan solusi nyata bagi aneka persoalan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi, pengangguran dan lain-lain. Benarkah praktik ekonomi Islam lebih menguntungkan dibanding praktik

dan wakaf. Namun demikian dalam operasionalnya BMT tidak harus melaksanakan ketiga bidang usaha tersebut karena lebih didasarkan pada kemampuan dan tergantung keunggulan masing-masing BMT. Lihat Didin Hafifuddin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 24

² Tim Pekapontren, *Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama RI), hlm. 35

ekonomi biasa? Terlebih jika pusatannya berada pada pusat pengembangan khazanah Islam yaitu pondok pesantren?

B. Ekonomi Syari'ah Versus Kapitalisme

Secara umum ekonomi dunia saat ini dimainkan sekurang-kurangnya tiga sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi pasar bebas (*free market system*) atau kapitalisme, sistem ekonomi sosialisme (*centrally planned*), dan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) yaitu campuran keduanya. Pada kenyataannya tidak ada satupun negara yang mempraktikkan sistem kapitalisme atau sosialisme secara murni dan konsekuen. Di berbagai negara pada umumnya mempraktikkan sistem ekonomi campuran, walaupun ada yang condong ke Kapitalisme atau ke Sosialisme.

Dapat dikatakan bahwa, bangunan sistem ekonomi saat ini, pada umumnya ditegakkan di atas fundamen ekonomi klasik Adam Smith dengan bukunya *The Theory of Moral Sentiments* (1759) dan *An Inquiry Into the Nature and Causes of Wealth of Nations* (1776), atau *The Wealth of Nations* yang bertumpu pada semboyan *the invisible hand* atau tangan gaib, yaitu jika seluruh perekonomian dibiarkan berjalan sendiri, tanpa diatur-diatur, maka ekonomi akan menemukan jalannya sendiri menuju kemakmuran, dan efisiensi (modal maupun tenaga kerja). Kecendrungan kepada sistem ekonomi kapitalisme lebih terasa dibanding sistem ekonomi sosialisme. Lebih-lebih sesudah tragedi revolusi Tian A Men di Beijing (1989) dan runtuhnya negara adi daya Uni Sovyet (1991).³

Prinsip Adam Smith, menurut Suherman tercermin dalam beberapa pokok pandangan ekonomi;

1. *Market Freedom*. Tiadanya campur tangan pemerintah di lapangan ekonomi, menempatkan pasar sebagai penentu, baik sebagai *organizer of production*, *price setter*, maupun *distributor of products*. Ketiga fungsi ini berlangsung melalui mekanisme pasar (*market mechanism*) atau mekanisme harga (*price mechanism*) yang terbebas dari campur tangan pemerintah. Namun kenyataannya *laissez faire* yang murni tidak pernah ada. Demikian pula kebebasan pasar.
2. *Self interest*. Bahan utama kebebasan pasar adalah pamrih pribadi atau *self interest*. Dalam perekonomian pasar bebas, *self interest*, merupakan suatu keharusan. Persaingan bebas dan pasar bebas merupakan dua sejoli, yang akan menjamin optimalisasi manfaat efisiensi ekonomi. Dalam kapitalisme, pamrih pribadi dipercaya sebagai pendorong utama tindakan manusia.

³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 67

3. *Individual freedom*. Seiring dengan self interest adalah individual freedom yang menjadi sumber jawaban tiga pertanyaan *What, How, dan For Whom* dalam perekonomian.
4. *Profit as the main stimuly*. Dalam teori maupun praktik, berlaku kaidah bahwa laba merupakan satu-satunya pertimbangan. Suatu barang atau jasa akan diproduksi, asal mendatangkan nilai netto, maka harus dilakukan, terlepas HALAL atau TIDAK HALAL.
5. *Rational economic man*. Dengan pijakan ini maka pelaku ekonomi diasumsikan sebagai orang yang pasti melakukan keputusan rasional untuk mengejar *maximum utility*.⁴

Prinsip-prinsip diatas pada kenyataannya tidak selalu sesuai untuk diterapkan di setiap tempat dan kesempatan. Ilmu ekonomi pada dasarnya selalu dihadapkan dengan persoalan riil perekonomian yang dihadapi manusia. Di Indonesia kini dibutuhkan suatu cara pandang baru ilmu ekonomi atau sistem ekonomi yang lebih dapat menjanjikan kesejahteraan yang adil dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi seperti kemiskinan, eksploitasi sumber daya dan lain-lain.

Sistem ekonomi konvensional atau kapitalisme karena itu dianggap telah mengalami kegagalan, karena tidak berhasil menciptakan kesejahteraan atau keadilan ekonomi di antara umat manusia dan bangsa. Sistem ini hanya menguntungkan segelintir masyarakat yang berkuasa atas modal dan sumber daya alam, tetapi mengesampingkan kebanyakan masyarakat dalam kondisi ketidakberdayaan baik dalam akses dan aktivitas ekonomi maupun hasilnya. Sistem ini tidak mampu mengentaskan kemiskinan dan terjadinya ketimpangan pendapatan antara negara-negara Dunia Pertama dan Negara Dunia. Demikian pula, pelestarian sumber daya alam terabaikan.

Khusus di Indonesia ketimpangan ekonomi menjadi realitas bukan hanya di pedesaan tetapi juga di perkotaan. Prosentase angka kemiskinan sangat tinggi yang mengakibatkan stabilitas sosial tidak kondusif karena angka kriminalitas dan kekerasan sosial mempunyai kecenderungan tinggi pula. Demikian pula angka pengangguran yang sangat tinggi.

Berbagai upaya pemerintah melalui alokasi pengurangan subsidi BBM melalui Bantuan Langsung Tunai dirasakan tidak efektif bahkan menyebabkan kerawanan sosial akibat ukuran dan standar penerima yang berhak atas BTL sulit dilakukan. Hal yang paling menyakitkan adalah, dengan wilayah pertanian yang begitu luas hingga kini negeri ini belum dapat memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Setiap tahun BULOG harus melakukan impor beras kurang

⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), hlm. 35

lebih hingga 1,5 juta Ton dari Vietnam dan Thailand. Demikian pula jagung, rempah-rempah bawang merah dan bawang putih.

Pembangunan Indonesia selama 25 tahun yang sesuai dengan standar Bank Dunia, ternyata telah memperluas kesenjangan diantara 32 propinsi, di mana 75% dan *Value added* industri Indonesia hanya berkumpul di Jawa. Sementara kepulauan bagian Timur Indonesia hanya mampu memproduksi 3% dari serluruh industrial output.⁵

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah direncanakan pada era presiden Megawati, menunjukkan arah yang baik. Hanya saja, karena banyak daerah yang tidak siap, alias *shock culture* maka sumber-sumber daya dan akses-akses yang tersedia lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang dekat dengan penguasa daerah tingkat I dan tingkat II. Atau mereka yang dulu telah berpengalaman dengan akses pusat. Jadilah mereka seakan menjadi penguasa-pengasa baru di masing-masing daerahnya. Apabila dulu pada masa sentralisasi, kekayaan daerah disetor ke pusat dan dikuasai oleh para pelaku ekonomi yang dekat dengan penguasa pusat, maka pada era otonomi, giliran penguasa daerah dan para pelaku usaha yang dekat dengannya “berpesta” menggunakan fasilitas kemudahan yang ada.

Dengan demikian pengaruh kapitalisme dalam sistem perekonomian negeri ini telah menjadikan sistem perekonomian mengabdikan pada kaum penguasa atau para pemilik modal, menjadikan pasar ekonomi dikuasai oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai kekuasaan modal dan akses kekausaan. Demikian pula, sumber daya alam yang seharusnya diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Undang-undang, hanya dinikmati oleh segelintir golongan semata. Selain itu ketergantungan utang terhadap negara-negara donor, semakin menjadikan posisi negara berada dalam posisi terjepit. Utang luar negeri pada dasarnya merupakan transaksi kepentingan-kepentingan politik ekonomi negara-negara dunia pertama yang diatasnamakan “bantuan lunak” atau bantuan kemanusiaan.

Atas permasalahan-permasalahan ekonomi demikian, maka diperlukan sebuah kritik ulang atau cara pandang terhadap ilmu ekonomi yang ada atau mencari alternatif sistem ekonomi lain yang berbeda dengan sistem ekonomi tersebut. Sistem ekonomi kerakyatan, sistem ekonomi pancasila, atau sistem ekonomi Islam. Poin itulah kiranya yang menjadi mimpi ahlim ekonomi seperti Mubyarto, AR Karseno, Sri Edi Swasono, Dawam Rahrdjo, Edi Suandi Hamid, Revrison Bawsir dan lain-lain, mereka konsern dalam pengembangan model ekonomi alternatif.⁶

Penggunaan sistem perekonomian syari’ah dengan berbagai turunan kebijakan dan operasionalnya, seperti sistem keuangan syari’ah dan perbankan

⁵ Republika On Line, 15 Juni 2013

⁶ Adiwarmar Karim, *op.cit.*, hlm. 56

syari'ah merupakan alternatif yang dapat diterapkan. Sistem keungan syari'ah, tidak mendorong budaya hutang, spekulasi dan praktik non-riba dalam mekanisme perbankan. Sistem ekonomi syari'ah dapat menekan penyakit konsumerisme, membiasakan perilaku hemat dan mendorong pada investasi-investasi produksi pada karya atau sektor riil. Dengan demikian sistem ini diyakini berpengaruh positif pada daya tahan dan stabilitas sistem perekonomian.

Sebagai sebuah disiplin, bagi AM Syaefuddin ekonomi Islam perlu diupayakan untuk menuntun kebijaksanaan pembagunan ekonomi dalam rangka regenerasi kebudayaan dari *homo-economicus* menjadi *homo-islamicus*. Keberhasilan proses ini bergantung pada ketepatan strategi untuk memulai perjalanan panjang dalam merubah struktur sosial ekonomi yang operatif dan tidak adil.⁷

Filsafat sistem ekonomi Islam berdasarkan pada 3 asas pokok yaitu dunia dan seisinya adalah milik Allah, Allah adalah Tuhan yang Esa dan keimanan pada hari pembalasan. Nilai-nilai dasar sistem ekonomi, bahwa kepemilikan terletak pada memiliki manfaatnya dan bukan menguasainya secara mutlak, kepemilikan sementara yaitu ketika hidup dan keterbatasan kepemilikan individu dari memiliki sumber-sumber yang menyangkut hajat orang banyak. Selain itu ditopang pula oleh nilai dasar keseimbangan dan keadilan. Adapun nilai-nilai instrumetalnya di antaranya adalah pelarangan riba, kewajiban zakat, pengembangan kerja sama ekonomi, adanya jaminan sosial dan peranan negara terhadap pengembangan sistem ekonomi ini.

Ketiga komponen tersebut pada hakikatnya bermuara pada unitas antara nilai-nilai etika dalam aspek ekonomi pada satu sisi dan pelarangan adanya unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman walaupun sedikit dalam niat, modal, proses dan hasil dalam keseluruhan aktifitas perekonomian. Di Indonesia, penyebutan ekonomi Islam mempunyai beberapa sebutan, ada yang menggunakan ekonomi Islam dan ada pula yang menggunakan ekonomi syari'ah. Penyebutan ekonomi Islam merupakan terjemahan dari Islamic Economic yang telah berkembang dan menjadi suatu keilmuan tersendiri di dunia Barat. Mereka beralasan, pada hakikatnya dalam sistem ekonomi yang paling penting adalah hakikat islami yaitu sesuai dengan karakter agama Islam yang adil, jujur, tanpa kedzaliman dan lain-lain. Dengan istilah ini, maka sistem ekonomi lebih memberikan porsi dan sangat bergantung kepada para pelaku atau aktor ekonomi. Sementara itu ekonomi Islam dipahami sebagai hasil khazanah dan karya para ekonomi muslim sebagai pengejawantahan nilai-nilai

⁷ Didin Hafiduddin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press 2003), hlm.70

ajaran ekonomi Quran dan Hadis dalam tataran kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan.⁸

Menurut Abdul Mannan, ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang dimaksud nilai-nilai di sini adalah nilai ajaran Islam mengenai berbagai persoalan ekonomi seperti nilai harta benda, nilai kepemilikan, nilai pembagian kerja, sistem haraga, harga yang adil, kekuatan permintaan dan penawaran, konsumsi dan produksi, penambahan penduduk, pengeluaran dan perpajakan pemerintah, peranan negara, lintas perdagangan, monopoli, pengendalian harga, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dan lain-lain.⁹

Dalam skala global perkembangan ekonomim Islam, didorong oleh suatu tujuan dan upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya agar berlandaskan pada Quran dan Sunnah. Tujuan ini salah satunya diimplementasikan dengan penerpan sistem *profit and loss sharing* dalam lembaga keuangan.

Dari prestasi yang telah ditorehkan oleh sektor perbankan syari'ah di Indonesia, walaupun dalam jangka waktu yang relatif singkat, hal ini menunjukkan keunggulan sistem ekonomi Islam. Dari aspek *financing deposit ratio* (FDR) atau LDR di perbankan konvensional sangat terlihat jelas perbedaannya. Apabila di perbankan konvensional angka 62% LDR sudah dianggap sebagai nilai yang baik, padahal hal itu memperlihatkan masih banyaknya dana di perbankan yang *idle* atau bahkan disimpan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI), maka di perbankan syari'ah FDR nya rata-rata telah mencapai diatas 100%. Hal ini membuktikan bahwa, fungsi intermediasi bank dapat difungsikan lebih baik oleh bank syari'ah. Yaitu banyaknya dana yang disalurkan pada proyek-proyek perekonomian padat karya sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian secara masif.¹⁰

Demikian pula, capaian FDR yang telah dilakukan oleh bank perkreditan rakyat syari'ah dan juga lembaga keuangan mikro syari'ah Baitul Mal Wattamwil. Ketika, pelaku sektor riil dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kesulitan untuk mengakses dana dari perbankan, maka BMT dengan fleksibilitas kelembagaan yang di punyainya dapat melakukan terobosan-terobosan sehingga para pelaku ekonomi rumahan dapat dibiayai baik melalui skim Murabahah, Musyarakah, Mudharabbah dan lain-lain. Dengan model pembiayaan dari BMT ini, maka perekonomian rakyat dapat bergerak secara

⁸ Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hlm. 45

⁹ Didin Hafifuddin, *Loc.cit.*

¹⁰ A. Qadri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 79

baik sehingga diharapkan dapat menekan angka kemiskinan. Pola BMT yang khas yaitu dengan model pemberdayaan dan pendampingan yang dipunyainya diyakini dapat menopang pergerakan usaha masyarakat secara tepat.¹¹

Dari aspek *non performing loan* di bank konvensional atau *non performing financing* di perbankan syari'ah atau dalam istilah umum dikenal sebagai kredit macet, kinerja perbankan syari'ah dapat bertahan dalam batas wajar yaitu pada angka 5%. Capaian prestasi perbankan syaria'ah demikian, banyak menggoda perbankan konvensional untuk membuka di bisnis perbankan syari'ah.

C. Peran Ekonomi Pesantren

Pondok Pesantren merupakan kekayaan khazanah budaya umat Islam Indonesia yang khas. Sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan, pesantren telah terbukti menjadi barometer pertahanan moralitas umat Islam yang mampu melakukan perubahan masyarakat di lingkungannya ke arah transformasi nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Pesantren juga merupakan lembaga yang mengerti dan memahai terhadap perubahan dan tantangan sosial masyarakat baik pada konteks lokal, nasional maupun global.

Budaya pesantren yang menekankan kesetaraan, kerakyatan dan keadilan, telah melahirkan suatu perubahan masyarakat menjadi moderen, namun tetap berpijak pada landasan tradisionalitas dan moralitas. Pesantren telah menciptakan kemajemukan dan kedinamisan sebagai sebuah lembaga multi fungsi yang melibatkan kiai, santri, ustadz, masyarakat, dan pemerintah. Dari identitas dan dinamisasi itulah, maka pesantren dapat berperan aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi bahkan politik.

Secara kelembagaan, pesantren di Indonesia memiliki kekuatan bertahan hidup yang luar biasa, sejak dahulu kala hingga kini. Di Turki, model pendidikan sejenis pesantren tidak dapat bertahan lama karena pembaharuan pendidikan Islam dilakukan dengan mengganti 100% model pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan umum yang diadopsi dari Eropa. Demikian pula yang terjadi di Mesir, yang awalnya menyandingkan model pendidikan umum dengan pendidikan tradisional. Namun, dalam perkembangannya model pendidikan umum semakin menguat dan memosisikan pendidikan mdrasah dan *kuttab* sebagai pelengkap meski sistem ini akhirnya dihapuskan.¹²

Pondok Pesantren di Indonesia dengan identitas, proses pendidikan dan pengajaran serta transformasinya yang khas telah memfungsikan dirinya sebagai lembaga pendidikan multi dimensi. Dalam prosesnya, pendidikan dan

¹¹ M. Umer Chapra, *loc.cit*

¹² Nurkholis Madjid, *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina 1997), hlm. 75

pengajaran keilmuan keislaman merupakan fungsi dasar yang paling utama. Kemudian dikembangkan pada fungsi-fungsi lainnya yang mendukung terhadap pusat pengembangan dan penyebaran misi dan dakwah Islamiyah dalam pengertian luas. Melalui pesantren, syiar-syiar Islam disosialisasikan melalui berbagai metode dan kegiatan-kegiatan nyata di masyarakat.

Pondok pesantren secara kultural dapat dipetakan berdasar ciri-ciri khas yang dipunyainya dalam menjalankan kiprah dan fungsinya. Termasuk ketika, pesantren melakukan perubahan orientasi dalam kegiatan-kegiatannya. Secara umum, pondok pesantren di Indonesia dapat dipetakan menjadi tiga tipe berdasar proses pendidikan dan pengajarannya:

Pertama, pesantren tradisional. Model pesantren ini mempunyai ciri khas yaitu pesantren yang dalam proses pengajarannya menjadikan masjid atau langgar (*mushalla*) sebagai unsur utamanya. Pertemuan kiai dengan santri dilakukan secara teratur, dengan sistem *halaqah* yang dilakukan bakda shalat subuh, zuhur, ashar, magribh dan isya. Pola pendidikan pesantren ini belum dipadukan dengan sistem pendidikan madrasah yang menggunakan kurikulum tertentu.

Kedua, pesantren moderen. Pondok pesantren ini merupakan pengembangan dari tipologi pesantren tradisional. Pesantren model ini ditengarai oleh semakin lengkapnya komponen-komponen pesantren yang tidak lagi sebatas pada rumah kiai dan masjid atau langgar, melainkan komponen lainnya yaitu asrama santri, dan kelas-kelas untuk belajar. Penerapan sistem pengajaran pondok tidak lagi berpusat di masjid, melainkan menggunakan ruang-ruang kelas, baik dalam bentuk madrasah *diniyah*, madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah maupun ma'had aly. Dalam sistem pesantren ini dikenal pembagian kelas berdasar tingkat dan materi pendidikan yang diajarkan seperti kelas dasar (*marhala ula*), kelas menengah (*marhala wustho*) dan kelas atas (*marhala ulya*), baik dengan kurikulum mandiri ayau gabungan antara kurikulum pesantren dengan kurikulum madrasah secara nasional.

Ketiga, pesantren terpadu. Tipologi pesantren ini merupakan pesantren yang dalam sistem pendidikan dan pengajarannya memadukan antara sistem pendidikan pesantren tradisional dan sistem pendidikan pesantren moderen. Dalam pesantren ini diajarkan kitab-kitab kuning dengan menggunakan sistem *halaqah*, *bandongan* dan *klasikal* tetapi di samping itu, diterapkan pula sistem sekolah dan berbagai pendidikan keterampilan khusus.¹³

Agar dapat menjawab tantangan zaman, pesantren melakukan diverifikasi peran, yaitu tidak hanya mengembangkan aspek kognitif keilmuan, tetapi juga aspek psikomotorik keahlian kecakapan hidup. Sebetulnya aspek pendidikan kecakapan hidup telah menjadi budaya pesantren. Hal ini dibuktikan dengan alumni-alumni pesantren yang mempunyai capaian kemandirian dalam

¹³ Tim Pekapontren, *op.cit.*, hlm. 79

bidang sosial ekonomi. Demikian pula bukti banyaknya kiai yang ahli ilmu keislaman sekaligus juga ahli berbisnis sebagai wirausaha. Sayangnya, pengembangan keahlian kecakapan hidup ini belum menjadi ciri khas pesantren pada umumnya dan belum ditransformasikan kepada para santri secara kelembagaan atau keorganisasian.

Atas dasar itulah, pengembangan program-program *short course life skill* yang diusung Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dimaksudkan untuk, *pertama*, memberikan berbagai keterampilan dan keahlian kepada santri putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. *Kedua*, memperluas akses dan kesempatan bagi santri untuk mengisi kebutuhan tenaga terampil/ahli pada bidang tertentu yang dibutuhkan dunia industri. *Ketiga*, memperkuat posisi pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian pondok pesantren dapat berperan luas dan dinamis baik melalui jalur formal maupun informal. Kini banyak pesantren yang telah terlibat dalam pengembangan sektor perekonomian seperti bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, pertokoan, koperasi, BMT dan Home Industri.

Pesantren agribisnis al Ittifaq di Ciwidey Bandung telah berhasil menjadik pesantren penghasil aneka sayur mayur dan setiap hari memasoknya ke berbagai super market di Bandung, Bogor, Depok dan Jakarta. Pesantren ini pun melibatkan seluruh santri dalam proses produksinya dan tidak memungut biaya atas seluruh biaya pendidikan di pesantren. Demikian pula dengan pesantren Madinatun Najah Pebayuran Bekasi. Pesantren ini sengaja didirikan oleh KH Mahrus Amin di atas tanah wakaf dari pengusaha H Yasin sebagai pesantren agribisnis. Santri di sini disiapkan untuk dapat terjun di dunia agrobisnis. Pada bulan Maret 2007 atas kerja sama dengan ICMI berhasil melakukan panen raya atas 235 Ha tanpa pestisida. Hasilnya dijual setelah memenuhi kebutuhan pesantren. Demikian pula magga dan Ratusan pohon yang mengitari areal pesantren.

Pesantren al Amin Preduan Sumenep telah berhasil mengembangkan usaha bahari dengan produk berbagai aneka industri ikan laut yang dilakukan melalui usaha mandiri dan kerja sama dengan masyarakat nelayan dan juga para alumni yang sudah berhasil sebagai pengusaha pengolahan ikan laut. Pesantren ar Risalah Ciamis Jawa Barat, secara khusus menegmbangkan usaha perikanan yaitu ikan gurame dan lain-lain. Hasilnya dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota Ciamis, Tasikmalaya dan sekitarnya. Pesantren ini didirikan secara Unik. Diakui oleh pendirinya, sebelum membangun pondok pesantren, yang lebih dahulu dibuat adalah kolam-kolam iskan di areal rencana pembangunan masjid, asrama santri, rumah pengasuh dan lain-lain. Dengan demikian yang didirikan adalah amal usaha pesantren terlebih dahulu, baru setelah menghasilkan pesantren didirikan. Dengan demikian hasil budi daya

ikan dan usaha-usah ekonomi lainnya, digunakan untuk menutupi kebutuhan keseharian pesantren dan santri-santrinya.

Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo di samping terkenal di bidang penguasaan bahasa asing Arab dan Inggris pesantren ini telah berhasil dengan pengembangan ekonomi melalui usaha-usaha sektor ritel seperti toko aneka kebutuhan serba ada (toserba), toko buku, toko besi, pengembangan koperasi pondok pesantren, hingga percetakan. Selain itu, memiliki usaha pada bidang pengelolaan hasil hutan.

Demikian pula pesantren Sidogiri Pasuruan, telah berhasil melakukan pengembangan aneka usaha hingga mempunyai asser 15 milyar di bawah koordinasi koperasi Pondok Pesantren. Asset ini disumbang melalui usaha-usaha percetakan, aneka pertokoan seperti buku, toko kelontong dan sembako, mini market, usaha pembuatan sarung dan busana muslim, produksi air minum mineral merk santri yang produksi perbulannya telah mencapai 25.000 pak atau 1.000.000 gelas. Asset ini belum termasuk BMT yang telah mencapai 20 Milyar.¹⁴

Berpijak pada berbagai potensi ekonomi yang dimiliki oleh berbagai pondok pesantren maka, menggerakkan sistem ekonomi syari'ah sangat tepat dilakukan dari pesantren. Sebagai bisnis fundamental ekonomi syari'ah yang dekat dengan aktifitas perekonomian masyarakat, lembaga keuangan mikro syari'ah atau Koperasi BMT sangat cocok dikembangkan di pesantren. Beberapa alasan riil dapat dikemukakan sebagai berikut;

Pertama, pesantren memiliki santri baik siswa sekaligus santri maupun santri murni yang pada waktu-waktu tertentu melakukan pembayaran untuk membantu biaya operasional pesantren sebagaimana SPP di sekolah-sekolah umum. Jumlah santri merupakan pasar potensial dana pihak ketiga bagi BMT melalui simpanan atau tabungan. Realitas demikian, sangat potensial bila dikelola Baitul Mal Watamwil (BMT).

Kedua, setiap pesantren memiliki pasar fanatik (*captive market*), yaitu santri, ustadz dan masyarakat di lingkungan pesantren. "Pasar" ini sangat potensial untuk berbagai sektor usaha riil seperti kantin, toko serba ada untuk kebutuhan sehari-hari, toko buku dan lain-lain. Aneka usaha ini dapat dikembangkan secara terpadu di bawah naungan koperasi BMT sebagai sektor riilnya.

Ketiga, jaringan santri, orang tua santri yang memiliki aneka usaha, aneka pekerjaan dan berbagai latar belakang yang telah terjalin sebagai ikatan orang tua wali santri sangat potensial sebagai jaringan pemasaran BMT dan sektor riil yang dikembangkan oleh pesantren. Adanya hubungan emosional

¹⁴ Mohamad Syaiful Bukhory, *Kebangkitan Ekonomi Syari'ah di Pesantren* (Pasuruan: Cipta Pustaka, 2004)

yang mengikat antar orang tua, masyarakat dan pesantren dapat diarahkan ke arah pengembangan bidang ekonomi untuk memajukan pesantren.¹⁵

Ketiga alasan di atas baru sebatas potensi umum yang telah dimiliki oleh hampir semua pesantren dan belum meliputi potensi-potensi ekonomi yang khas yang ada lingkungan internal setiap pesantren dan belum termasuk potensi-potensi ekonomi di lingkungan pesantren yang pasti berbeda-beda. Pada dasarnya pengembangan amal usaha ekonomi pesantren harus dimulai dari potensi ekonomi yang ada di lingkungan internal pesantren dan setelah solid baru dikembangkan untuk menjangkau potensi di lingkungan sekitar pesantren.

D. Posisi Strategis BMT Pesantren

BMT atau Baitul Mal Wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syari'ah yang berfungsi ganda sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial. Sebagai lembaga ekonomi ia mengembangkan perekonomian umat dengan kelembagaan koperasi yang operasionalnya meminjam teknis operasional perbankan syaria'ah. Sementara itu fungsi sosial BMT yaitu pengelolaan dan pengembangan Baitul Mal, sebagaimana telah dicontohkan dalam praktek masa Nabi SAW dan sahabat terutama era Umar bin Khattab. Dengan kedua fungsi itu, BMT mempunyai peranan dan fungsi yang sangat luas bahkan lebih luas dari bank syari'ah sekalipun. Bank syari'ah terikat dengan aturan main sebagai Bank di bawah kendali dan pengawasan Bank Indonesia. Sedangkan BMT hanya terikat dengan komitmen moral sebagai intitusi ekonomi syari'ah yang pro pada wong cilik dengan landasan ajaran Islam.

Dengan keberadaan demikian, maka pengelolaan dan pengembangan BMT mempunyai sisi positif sekaligus posisi negatif. Sisi positif terletak pada keluasan wilayah garapan dan fleksibilitas kelembagaan yang dimilikinya termasuk dalam pengembangan produk dan pengembangan unit-unit bisnis strategis sektor riil dalam berbagai ragamnya. Sebaliknya sisi negatif pada aspek, bila orang-orang yang berada di belakang BMT yaitu pengelolanya menggunakan sisi positif BMT untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya semata-mata. Di sinilah konsistensi moralitas dan komitmen bahwa BMT sebagai media untuk pemberdayaan umat sangat sering diuji.¹⁶

Demikian pula tantangan ketika BMT masih sering dianggap sebagai lembaga penyalur dana gratis dari pemerintah. Atau lembaga mirip bank yang berseragam anti riba dan sesuai syari'ah tetapi kenyataannya sama saja dengan bak konvensional. Demikian pula ketika proses pengajuan pinjaman di BMT dianggap sulit, njelimet, lama dan mahal. Pada pin-poin inilah BMT menghadapi tantangan yang tidak ringan. Bagaimana agar BMT dapat

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 80

memberikan layanan proses yang mudah, cepat, murah dan lebih menguntungkan.

Apabila ujian-ujian tersebut bisa diatasi, maka BMT akan berperan sebagaimana peran sesungguhnya. Sebaliknya bila tidak, BMT akan menjadi kedok atau topeng lembaga keuangan yang menggunakan atribut syari'ah seperti *no riba*, *no gharar* dan *no maysir*. Atas tantangan itulah BMT harus dikelola dengan manajemen yang apik, mengembangkan jaringan bersama, baik dengan sesama BMT maupun dengan asosiasi-asosiasi lain seperti BMT center, Masyarakat Ekonomi Syari'ah, Badan Arbitrase Ysrai'ah Nasional, perbankan Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Pergiarian Tinggi Ekonomi Islam dan lain-lain untuk melakukan percepatan guna menghadapi tantangan tersebut. Semua jaringan dituntut untuk melakukan konsolidasi ke dalam dan ke luar guna penguatan fungsi ekonomi dan sosialnya untuk pemberdayaan ekonomi umat.

Dari aspek pasar sasaran, fokus garapan BMT adalah masyarakat menengah ke bawah. Posisi pasar ini masih sangat luas dan strategis untuk ditembus oleh usaha BMT. Keberadaan usaha mikro kecil dan menengah pada umumnya berada di lingkungan masyarakat. Dalam percaturan politik bangsa ini, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga kini masih tetap tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Janji para menteri bahkan peresiden sekalipun telah merencanakan program memudahkan akses permodalan bagi UMKM lewat penjaminan kredit sebesar 1,4 Triliyun hingga kini belum terealisasi, karena pemerintah tidak menemukan sumber dananya.

Atas realitas demikian, maka ketika para pelaku usaha tidak terjangkau oleh lembaga keuangan perbankan karena alasan-alasan klasik seperti ketiadaan jaminan, ketiadaan izin usaha, ketiadaan laporan keuangan, kemampuan SDM pelaku usaha mikro yang diragukan dan lain-lain maka di sinilah posisi strategis BMT dapat berperan aktif agar usaha-usaha tersebut dapat berkembang. Pada umumnya problem utama usaha mikro dan kecil atau usaha rumahan di samping aspek manajerial dan pemasaran adalah aspek permodalan. BMT dapat berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan kedua aspek permodalan dengan sistem pinjaman, BMT pun merupakan mitra pendamping dalam pengembangan manajemen dan pemasaran sektor usaha-usaha mikro, kecil dan menengah. Pada aspek-aspek itulah, strategi pengembangan koperasi BMT pesantren. BMT dapat menopang perekonomian pesantren sekaligus dapat memajukan perekonomian masyarakat.¹⁷

Pengembangan bidang ekonomi pondok pesantren dimaksudkan untuk menopang kemadirian pesantren secara kelembagaan pada satu sisi dan menyiapkan kecakapan hidup bagi para santrinya. Kesan bahwa santri hanya pintar mengaji dan berdoa dengan pengembangan bidang ekonomi dapat dijawab dengan bukti nyata. Kemadirian hidup dalam bidang ekonomi pada

¹⁷ *Ibid.*

dasarnya merupakan implementasi ajaran agama Islam dan pesantren mengajarkan ajaran-ajaran Quran dan hadist. Quran secara tegas melarang umat Islam meninggalkan anak cucu dalam kondisi yang lemah termasuk lemah secara ekonomi. Demikian pula mengancam secara tegas terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman dalam praktek perekonomian. Dengan demikian menyiapkan generasi mandiri secara sosial ekonomi dan berdaya saing tinggi dengan tetap berpegang teguh pada ajaran agama merupakan keharusan bagi setiap orang termasuk bagi lembaga pendidikan seperti pesantren.¹⁸

Pada umumnya pesantren dapat mempertahankan proses pendidikannya bertumpu pada dana sosial kemasyarakatan. Dana ini dapat berasal dari infak, shadaqah bahkan zakat. Dengan demikian, muncul pemahaman bahwa pesantren merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang layak untuk dibantu dan didukung oleh kaum muslimin. Memang dalam hal ini tidak ada yang keliru, tetapi tidak jarang pihak-pihak tertentu memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu, dengan mengatasnamakan kepentingan pembangunan masjid, pesantren, madarasah dan lain-lain.

Kemandirian pesantren, termasuk di dalamnya pembangunan kemandirian santri sesungguhnya telah memiliki sejarah yang kuat di dunia pesantren. Menurut Azyumardi Azra dalam Nurcholis Majid (2004) sejumlah pesantren telah membiasakan model pendidikan keterampilan yang menyatu dalam pendidikan pesantren. Pada masa kesulitan ekonomi yang di hadapi bangsa Indonesia pada dekade 1950-an dan awal 1960-an pembaharuan pesantren banyak diarahkan kepada pemberian pelatihan keterampilan khususnya dalam bidang pertanian yang ditujukan sebagai bekal santri disamping untuk menopang ekonomi pesantren. Pilihan ini sangat logis sebagai jawaban tuntutan untuk *self supporting* dan *self financing*. Di antara pesantren yang aktif dalam bidang pengembangan ekonomi pertanian pada era ini adalah pesantren Tebuireng dan Rejoso yang melibatkan para santri dalam budidaya penanaman padi, kelapa, tembakau dan kopi. Kemudian pesantren-pesantren besar seperti Gontor, Denanyar, Tambak beras, dan Tegalrejo mendirikan dan mengembangkan koperasi. Melalui koperasi inilah program pengembangan ekonomi pesantren dilakukan secara berkesinambungan.

Sayangnya, model pengembangan ekonomi pesantren demikian, hingga kini belum menjadi elan vital yang utama atau proses yang menyatu bagi pesantren kebanyakan. Pada umumnya pesantren dengan ciri khas kesederhanaannya, lebih berpedoman kepada prinsip “lillahi ta’ala” dalam pengertian sempit. Tujuan utama, pesantren adalah mendidik moralitas sentri melalui pengajaran dan pendidikan keilmuan keislaman. Sedangkan urusan ekonomi merupakan urusan *fardhu kifayah*. Konsekuensi atas pemahaman sempit *fardhu kifayah* ini menyebabkan tidak sedikit di antara pesantren yang

¹⁸ Lukman Fauroni, *op.cit.*, hlm. 76

merasa cukup diri dengan kondisi serba sederhana dan menjauhkan diri dari aktivitas perekonomian. Realitas dan karena alasan-alasan itulah kiranya mengapa hanya sejumlah kecil pesantren yang memilih melakukan pengembangan ekonomi pesantren sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran pesantren.¹⁹

Pada kesaharian ini, merupakan hal yang tidak sulit dijumpai, sekelompok orang atau individu-individu yang berkeliling dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor dari satu kota ke satu kota yang lain dengan membawa proposal dan list sumbangan untuk dana pembangunan masjid, pesantren atau madrasah. Bahkan pada dekade 2000-an sampai kini muncul hampir di setiap daerah sekelompok orang, dengan alat pengeras suara, drum-drum yang di tempatkan di tengah jalan raya dan alat untuk menangkap ikan, menghampiri para pengguna jalan untuk meminta infak guna pembangunan masjid, atau pesantren dan lain-lain. Adapula yang sengaja berkeliling dari kota ke kota lainnya dengan kendaraan yang dilengkapi alat pengeras suara dan beberapa tenaga beratribut santri berkeliling meminta-minta infak guna pembangunan pesantren atau madrasah. Dari situlah kemudian muncul kesan bahwa pesantren atau lembaga-lembaga keagamaan Islam kerjanya hanya bergantung dan meminta-minta.

Kondisi ini jelas tidak baik dan tidak mendidik bahkan menjatuhkan harga diri umat Islam sendiri. Meskipun benar bahwa infak untuk masjid merupakan perbuatan mulia, tapi cara-cara demikian tidak sesuai dengan hakikat ajaran Islam sendiri yaitu memberi lebih baik dari pada meminta. Masih banyak cara-cara yang lebih elegan dan terhormat serta dapat menghasilkan dana yang tidak sedikit.

Ketergantungan lembaga-lembaga keagamaan Islam demikian, terlihat pula pada sapek politik. Terutama pada masa kejayaan paratai Politik Golkar di masa Orde Baru, muncul identitas pesantren-pesantren pendukung partai pohon beringin dikarenakan bantuan-bantuan dari pemerintah yang di atasnamakan partai. Karena itu tak jarang antar pimpinan pondok pesantren satu dengan yang lainnya berbeda pendapat bahkan berselisih secara tajam hanya karena problem perbedaan kepentingan politik. Terplesetnya pesantren ke dalam aura wilayah kepentingan politik ini telah menjadikan kemandirian pesantren menjadi ternodai.

Ketergantungan pesantren baik secara sosial maupun politik dengan demikian, melalui pengembangan bidang ekonomi pesantren dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. Pesantren dapat melakukan "*bergaining position*" dengan pihak manapun termasuk partai politik bahkan pemerintah mengenai beberapa hal demi kepentingan masyarakat dan bangsa. Sesuai

¹⁹ Mohammad Saiful Bukhory, *op.cit.*, hlm. 40

misinya, pesantren adalah dari umat untuk umat tanpa melihat perbedaan-perbedaan status sosial ekonomi apalagi politik.

Etos ekonomi dan bisnis pada dasarnya merupakan pelajaran pertama yang diperankan Nabi Muhammad sejak usia belia dalam mengemban misi kenabiannya. Bagaimana beliau mulai belajar kegiatan ekonomi sektor riil dalambimbingan dan pengawasan pelaku bisnis berpengalaman, yaitu Abu Thalib. Setelah siap melakukannya secara mandiri, Nabi Muhammad kemudian diarahkan untuk melakukan kegiatan bisnis yaitu bekerja sama dengan Siti Khadijah yang kemudian justru memilihnya sebagai pendamping hidup. Rasulullah melakukan cara-cara bisnis dengan ramah, jujur, saling menguntungkan. Apabila terdapat kecacatan dalam suatu barang, disebutkan apa adanya. Demikian pula, menekankan pentingnya kemitraan dan silaturahmi. Berbeda dengan kebiasaan para saudagar Qurasy yang hanya menekankan keuntungan sebagai satu-satunya tolok ukur, walaupun harus dicapai dengan cara-cara yang merugikan pihak lain atau konsumen. Sketsa hal ini, jelas tergambar dalam Quran surat al Muthoffifin, 83: 2-3, yaitu kebiasaan menyempurnakan takaran atau timbangan ketika mereka membeli, tetapi sengaja mengurangi ketika menjualnya kembali.

Nabi Muhammad menjalankan kegiatan ekonomi produktifnya dengan dua kategori keahlian, seperti juga yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika diangkat menjadi Bendaharawan negara. *Pertama*, memiliki kemampuan sebagai penjaga, agar tidak terjadi kebocoran, pemborosan, misalnya manajemen dan lain-lain. Selain itu memiliki kemampuan sebagai pengelola dan pengembangan, yang berdasar pada kategori keahlian kedua, yaitu memiliki keilmuan dan keluasan wawasan tentang sistem dan mekanisme ekonomi sehingga kegiatan usahanya dapat berkembang dengan sukses.

Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara di Madinah, Nabi menciptakan suatu unsur ekonomi yang baik. Penawaran dan permintaan pasar diarahkan agar seimbang secara alami. Siapapun boleh masuk ke pasar dan tidak boleh ada yang menguasai komoditas tertentu sehingga dapat memainkan harga. Demikian pula praktik penimbunan dan monopoli sangat dilarang. Praktik-praktik ekonomi yang merugikan seperti transaksi yang mengandung unsur penipuan, kesamaran, riba, judi, ketidak-pastian, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap dikikis dengan kebijakan politik. Nabi memberlakukan standarisasi timbangan dan ukuran dan melarang mempergunakan standar timbangan yang tidak terlisensi.²⁰

Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, untuk memperkokoh etos ekonomi dan bisnis bahwa: “tidak seorangpun yang pernah makan makanan yang lebih baik dari apa-apa yang ia makan-kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri (HR Bukhory). Para Sahabat Nabi pun melakukan usaha-usaha

²⁰ Lukman Fauroni, *op.cit.*, hlm. 34-35

produktif. Abu Bakar dan Utsman bin Affan mengembangkan usahanya dalam bisnis pakaian, Umar bin Khattab memiliki usaha sektor riil bahan makanan pokok.

Gambaran di atas merupakan tugas suci yang harus diemban oleh BMT pesantren. Ulama adalah pewaris Nabi, demikian pula pesantren pewaris nabi dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang ekonomi. Bagaimana agar BMT dapat menggerakkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan proyek-proyek padat karya dan sektor riil maupun ritel. Di sekitar pesantren, dipastikan banyak terdapat pelaku usaha mikro dan kecil baik usaha rumahan (*home industri*) maupun ritel seperti; usaha pengolahan makanan kecil, pengolahan makanan, pertukangan kayu, konveksi, mebeuler, pertanian, warung nasi, pedagang kelontong, pedagang sayur, aneka servis alat-alat rumah tangga, servis televisi, komputer dan lain-lain. Semua aneka jenis usah tersebut merupakan usaha produktif yang apabila dikembangkan secara baik akan menjadikan roda perekonomian masyarakat berjalan baik.

Melalui sistem operasional yang bertumpu pada sistem bagi hasil, BMT dapat memberikan pembiayaan modal sesuai kebutuhan pelaku usaha dengan format pembiayaan yang saling menguntungkan. Melalui tim manajemennya, BMT pun dituntut dapat memberikan pendampingan terhadap para pelaku usaha meliputi aspek-aspek produksi, aspek manajemen, aspek pemasaran, aspek pengembangan usaha dan lain-lain. Dengan demikian BMT dituntut untuk menjadi sentra pengembangan dan pendampingan usaha-usaha produktif. Bagaimana strategi dan cara-cara Nabi Muhammad mendorong dan menggerakkan roda perekonomian, adalah strategi dan cara-cara yang harus diteladani oleh para pelaku BMT.

Bercermin dari pertumbuhan ekonomi Jepang, China, Korea adalah negara-negara yang mempunyai perekonomian yang kokoh yang bertumpu pada sektor ekonomi padat karya, ekonomi rumahan dan sektor usaha riil. Produksi sepeda motor di China sebagiannya adalah merupakan produk home industri. Demikian pula, seperti sepatu, pakaian, dan lain-lain pada umumnya merupakan produk rumahan yang berkolaborasi dengan pabrik-pabrik besar.

Sebaliknya, perekonomian negeri berpenduduk terbesar di dunia ini yang bermimpi menjadi negara yang berbasis pada sektor industri, ternyata tidak menghasilkan perekonomian yang solid. Sektor pertanian yang merupakan sektor terbesar di antara penduduk, justru diabaikan. Demikian pula sektor usaha mikro dan kecil tidak mendapat tempat yang layak di negeri sendiri, tergerus oleh kepentingan Kapitalis politik ekonomi dunia dan pengusaha besar. Akibatnya, ketika diterpa badai krisis perekonomian nasional luluh lantak, karena tidak mempunyai fundamental ekonomi yang kokoh.

Di luar dugaan, sektor ekonomi mikro dan kecil, karena menggunakan modal sendiri dan tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga mata asing kondisinya lebih stabil. Namun dengan bukti itu, pemerintah tetap pada

pendiriannya, belum beranjak untuk segera melakukan *political will* dan program-program guna memperkuat sektor UMKM. Kenyataan kini UMKM kita dihadapkan dengan serbuan produk-produk impor yang murah tetapi berkualitas dari China, Hongkong, Korea dan lain-lain. Inilah tantangan besar perekonomian masyarakat; menunggu peran BMT pesantren. Peran serta untuk menggerakkan sektor ekonomi mikro dan kecil melalui ekonomi syari'ah. Dimulai dari usaha-usaha rumahan untuk menutupi kebutuhan masyarakat sekitar.²¹

Pada masa permulaan, biasanya BMT mengoperasionalkan fungsi yang pertama yaitu usaha jasa simpan pinjam. Jasa simpanan kemudian dikembangkan menjadi produk sesuai kebutuhan, seperti simpanan pendidikan, simpanan lebaran, simpanan qurban dan lain-lain. Demikian pula jasa pinjaman dikembangkan menjadi berbagai produk sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pinjaman untuk produk konsumsi menggunakan akad *mudharabah*.²²

BMT mempunyai visi mewujudkan BMT sebagai lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah dalam pengertian yang luas para anggota BMT. Sehingga mampu berperan sebagai hamba Allah yang shaleh yang dapat memakmurkan berbagai potensi bagi kepentingan kemaslahatan masyarakat. Dengan visi ini, maka BMT dituntut untuk menjadi organisasi yang profesional dan amanah.

Adapun tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota BMT harus diberdayakan supaya dapat menggapai kemadirian ekonomi yang lebih baik. Dari sisi azas dan landasan, BMT berazaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan pada syari'at Islam, keimanan, kekeluargaan, kerja sama, kebersamaan, profesionalisme, dan istiqamah.

Dengan demikian, BMT berupaya mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam dalam menggerakkan roda perekonomian dari arah perekonomian rakyat. Dengan landasan nilai-nilai ajaran Islam dalam praktik perekonomian, maka BMT akan berperan mengeliminir bahkan menghapuskan praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat, melawan hukum, merugikan salah satu pihak, merugikan masyarakat dan lain-lain. BMT dapat mendorong produktivitas

²¹ Taqyuddin an Nabhany, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 46

²² Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan dana 100%. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Lihat, Abdul Aziz Muhamad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 245

ekonomi masyarakat dalam bingkai untuk mencari karunia Allah yaitu keuntungan hakiki.²³

Dalam Quran suran an Nisa, 4: 29 ditegaskan: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Dalam ayat ini Allah SWT menetapkan prinsip dasar tentang keseluruhan transaksi dalam bidang ekonomi dan bisnis yang tidak boleh dilakukan kecuali dengan cara-cara yang saling menguntungkan, tanpa ada salah satu atau pihak lain yang merasa dirugikan bukan hanya ketika terjadi transakis melainkan sampai setelah transaksi. Bahlan ahir ayat ini menegaskan memulai pemahaman terbalik, bahwa orang yang melakukan praktik ekonomi dengan cara yang batil atau praktik yang menyebabkan kerugian atau kekecewaan pada pihak lain, maka sama nilainya dengan membunuh diri sendiri.

E. Penutup

Realita memperlihatkan kelemahan sistem ekonomi konvensional yang telah banyak mempengaruhi praktik perekonomian di negeri berpenduduk muslim terbesar se dunia Indonesia. Kelemahan sistem ekonomi konvensional semakin nyata ketika perekonomian negeri ini dinobatkan sebagai negara yang kehilangan tingkat daya saing karena menempati posisi ke 54 dari 55 negara yang disurvei oleh *International for Management Devolopment (IMD)*. Bahkan Indonesia menempati posisi terburuk dari 13 negara di Asia Ocenia bahwa Filipina, Thailand, Korea Selatan, India, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Taiwan, China, Australia, Hongkong dan Singapura.

Realitas dan fakta keterpurukan perekonomian itu, tak pelak tidak dapat dilepaskan dari kelemahan sistem ekonomi yang menjadi paragdigmanya; sistem ekonomi konvensional telah gagal merealisasikan misinya untuk memabngun kesejahteraan umat manusia. Pada titik inilah revolusi paradigma perekonomian harus segera dilakukan. Sistem ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah, ditawarkan sebagai alternatif solusi perbankan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertumpu pada fundamental ekonomi yaitu sektor keuangan yang menggerakkan sektor dunia bisnis. Dalam konteks ini sektor ekonomi mikro dan kecil yang menjadi mata percaharian utama kebanyakan masyarakat di pilih melalui pengembangan ekonomi pondok pesantren.

Koperasi Baitul Mal Wattamwil , terpilih sebagai motor penggerak lokomotif pengembangan ekonomi syari'ah kerana sifat kelembagaan BMT

²³ Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil* (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 58

yang fleksibel terhadap berbagai potensi perekonomian masyarakat di mana BMT itu didirikan. BMT dapat menjadi organ inti sel bisnis dalam bidang bisnis jasa keuangan syari'ah, sekaligus dapat memiliki aneka sektor riil sebagai sub organnya yang pada umumnya telah ada di lingkungan pesantren. Di samping itu, setiap pesantren pada dasarnya telah memiliki pelanggan tetap yang hanya membutuhkan sentuhan-sentuhan manajerial bisnis agar dapat bergerak progresif sebagai tulang punggung ekonomi pesantren.

Diharapkan setelah BMT pesantren dengan sektor riil yang ada di lingkungan internal pesantren telah solid, kemudian dilakukan perluasan pasar bisnis yaitu pengembangan dan pemberdayaan potensi ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat pesantren. Secara faktual pesantren telah menjadi magnet, bagi masyarakat kebanyakan dalam bidang sosial pendidikan, keagamaan dan dakwah. Magnet inilah yang didorong dan diperluas ke arah pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ekonomi syari'ah merupakan implementasi ajaran Islam dalam bidang ekonomi, yang pada hakikatnya menjadi bagian tak terpisahkan dari misi pesantren dalam berbagai kiprahnya.

Sebagai lembaga sosial yang sangat dekat dengan masyarakat, pesantren berpotensi strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena pesantren sejak lama telah memiliki komitmen dalam memajukan masyarakat baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal pesantren. Ajaran Islam yang menjadi landasan fundamental gerakan dan misi pesantren secara tegas dan jelas mengarahkan umatnya untuk menjadi orang kaya, minimal dapat menjadi muzakki dan dapat melaksanakan ibadah haji. Demikian pula, Islam mengajarkan untuk menyantuni kaum kerabat, fakir miskin, anak yatim dan menghindarkan diri dari kefakiran dan kemiskinan. Implementasi ajaran Islam, tidak dapat tercapai secara optimal tanpa ketersediaan materi. Ajaran-ajaran fundamental tersebut, secara jelas telah dilukiskan dalam perilaku Nabi Muhammad, baik ketika belum menikah, setelah menikah juga setelah menjalankan mandat kenabian.

Pilihan koperasi BMT pesantren sebagai penggerak roda perekonomian umat, Karena para pelaku ekonomi mikro, ekonomi rumahan (home industri) pada umumnya memiliki kelemahan karena kekurangan aspek modal, aspek keterampilan dan keahlian serta kelemahan dalam bidang manajerial dan pemasaran. BMT sebagai lembaga bisnis jasa keuangan syari'ah yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi mikro, mempunyai kapabilitas untuk merubah aspek-aspek kelemahan para pelaku ekonomi mikro tersebut. BMT dapat menjadi sumber pemodal, lembaga pendampingan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pusat pelatihan keterampilan *life skill* dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al 'Assal, Ahmad Muhammad, dkk. 1999. *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: CV. Pustaka setia
- An Nabhany, Taqyuddin, 2002. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Bakhary, Mokh Syaiful. 2004. *Kebangkitan Ekonomi Syari'ah di Pesantren*. Pasuruan: Cipta Pustaka Utama.
- Chapra, M. Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Surabaya: Risalah Gusti
- Fauroni, Lukman. 2006. *Etika Bisnis dalm Al Qura'an*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Hafiduddin, Didin. 2003. *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Karim, Adiwarmarman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pers
- Madjid, Nurkholish. 1997. *Bilik-bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina
- Tim Pekapontren. 2004. *Potensi Ekonomi Pondok Pesantren di Indonesia*. Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Departemen Agama RI.
- Widodo, Hertanto. 2000. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wattamwil*. Bandung: Mizan